

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesejahteraan rakyat merupakan salah satu poin penting yang harus diperhatikan pemerintah. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerintah pusat hingga daerah berupaya untuk meningkatkan perekonomian melalui kinerjanya yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga tatanan masyarakat dapat terbentuk dengan baik, dengan harapan masyarakat dapat memiliki kehidupan yang layak dan sejahtera. Salah satu misinya, yaitu menurunkan tingkat kemiskinan. Disisi lain, tingkat kemiskinan di suatu wilayah atau negara dari sudut pandang ekonomi merupakan salah satu skala ukur atau indikator untuk mengetahui derajat kesejahteraan masyarakat suatu negara.

Kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok atau standar hidup yang rendah, hal tersebut berhubungan dengan penghasilan yang kecil, tempat tinggal yang kurang atau tidak layak, kondisi kesehatan yang buruk, pelayanan kesehatan yang tidak baik, dan rendahnya tingkat pendidikan yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia, serta tingginya angka pengangguran (Kuncoro, 2007).

Landasan yang mengarah atau mengacu pada garis kemiskinan disebut kemiskinan absolut, dimana kondisi kemiskinan berada pada tingkat bawah, keadaan yang tidak mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan kecil atau minimum untuk bertahan hidup relatif, dimana konsep pengukurannya tidak berdasarkan garis

kemiskinan melainkan berupa ukuran untuk melihat perbedaan distribusi pendapatan (Kuncoro, 2007).

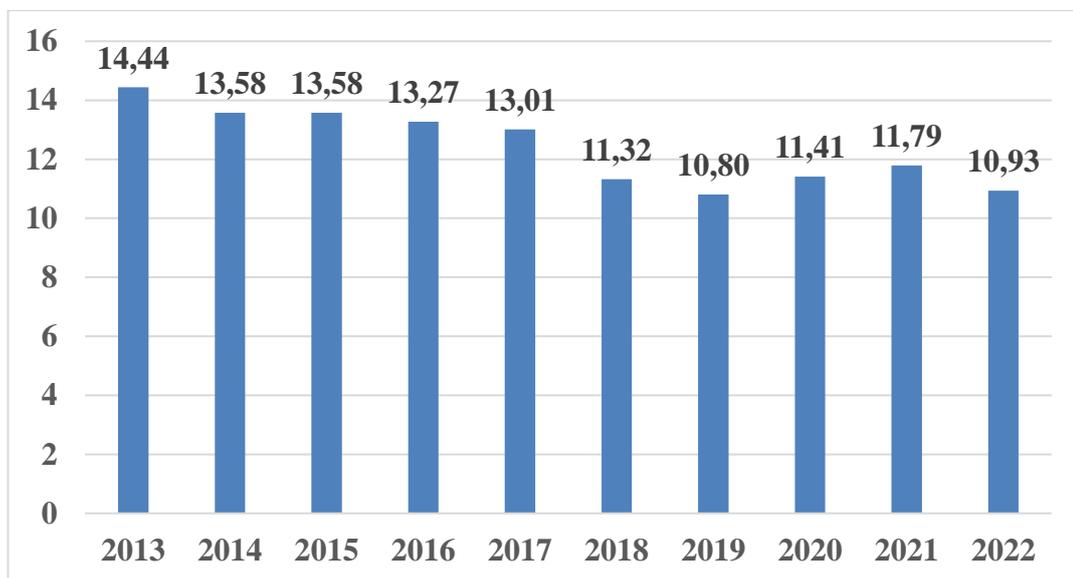
Kemiskinan merupakan fenomena sosial yang sering terjadi pada negara-negara dunia ketiga. Kemiskinan ditandai dengan keterbelakangan dan ketertinggalan, rendahnya produktivitas dan rendahnya pendapatan yang diterima, keterbatasan akses dan kemampuan, serta kesempatan untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kesejahteraan (Putri et al., 2019).

Tingkat kemiskinan merupakan tantangan yang sedang dihadapi oleh negara Indonesia. Sebagai negara berkembang, Indonesia menciptakan beberapa program untuk menuntaskan kemiskinan. Kemiskinan ialah suatu persoalan yang sangat diperhatikan khusus oleh pemerintahan. Kemiskinan identik dengan keadaan yang berkaitan dengan kesulitan dan kekurangan dalam mencukupi kebutuhan hidup seseorang. Tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, tingkat kesehatan, dan tingkat pertumbuhan ekonomi saat ini yang harus diperbaiki sehingga dengan itu tingkat kemiskinan akan mengikuti (World Bank, 2021).

Tujuan pembangunan nasional Indonesia yang sesuai dengan Undang-Undang 1945, yaitu mensejahterakan masyarakat. Kesejahteraan dalam hal ini mencakup kebutuhan material dan sosial masyarakat secara merata terpenuhi. Tingkat kesejahteraan di Indonesia digambarkan dengan tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan yang rendah menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat tinggi. Setiap tahunnya pemerintah telah melakukan upaya dalam pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah melakukan kegiatan, seperti pembangunan ke daerah-daerah yang mempunyai

jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan yang rendah (Badan Pusat Statistik, 2021).

Jawa Tengah merupakan provinsi ketiga yang memiliki jumlah penduduk tertinggi di Indonesia. Begitupun dengan tingkat kemiskinannya, provinsi Jawa Tengah menjadi provinsi paling miskin kedua di pulau Jawa. Berikut ini merupakan grafik tingkat kemiskinan di provinsi Jawa Tengah dari tahun 2013-2022.



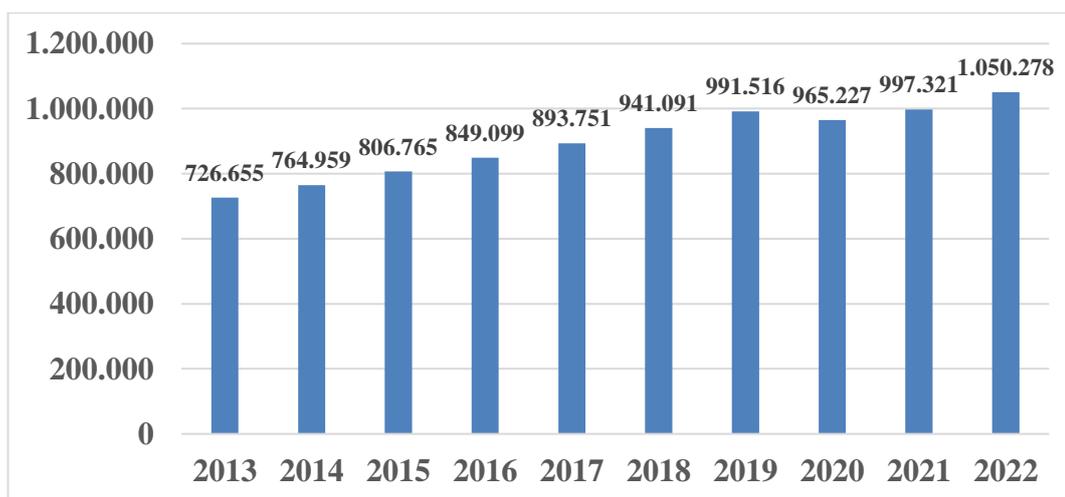
Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 1.1
Tingkat Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2013-2022 (Persen)

Berdasarkan gambar 1.1, tingkat kemiskinan di provinsi Jawa Tengah terus menurun selama 10 tahun terakhir, walaupun penurunannya cukup kecil. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tingkat kemiskinan provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013 yang memiliki tingkat kemiskinan mencapai 14,44% dari total penduduk di provinsi Jawa Tengah dan merupakan tingkat kemiskinan tertinggi. Sementara tingkat kemiskinan terendah selama 10 tahun terakhir terjadi pada tahun 2019 sebesar 10,80%.

Untuk mengurangi tingkat kemiskinan, PDRB suatu daerah harus tinggi. Jika PDRB suatu daerah tinggi, hal tersebut dapat mengurangi tingkat kemiskinan yang ada dengan cara menciptakan lebih banyak peluang kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Jika PDRB meningkat, hal itu bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat, yang pada gilirannya dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, PDRB yang tinggi dapat memberikan fondasi yang baik untuk mengurangi tingkat kemiskinan.

Sejak tahun 2013 sampai 2022, PDRB provinsi Jawa Tengah selalu tercermin baik, tetapi pada tahun 2020 PDRB provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan yang signifikan dikarenakan pandemi Covid-19. PDRB provinsi Jawa Tengah itu sendiri sudah mampu melebihi tingkat laju pertumbuhan PDB Nasional. Walaupun demikian, jika dibandingkan dengan provinsi lain di pulau Jawa, PDRB provinsi Jawa Tengah masih paling rendah. Grafik berikut ini menunjukkan laju PDRB Atas Dasar Harga Konstan di provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2022.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 1.2
PDRB ADHK Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2013-2022 (Miliar Rupiah)

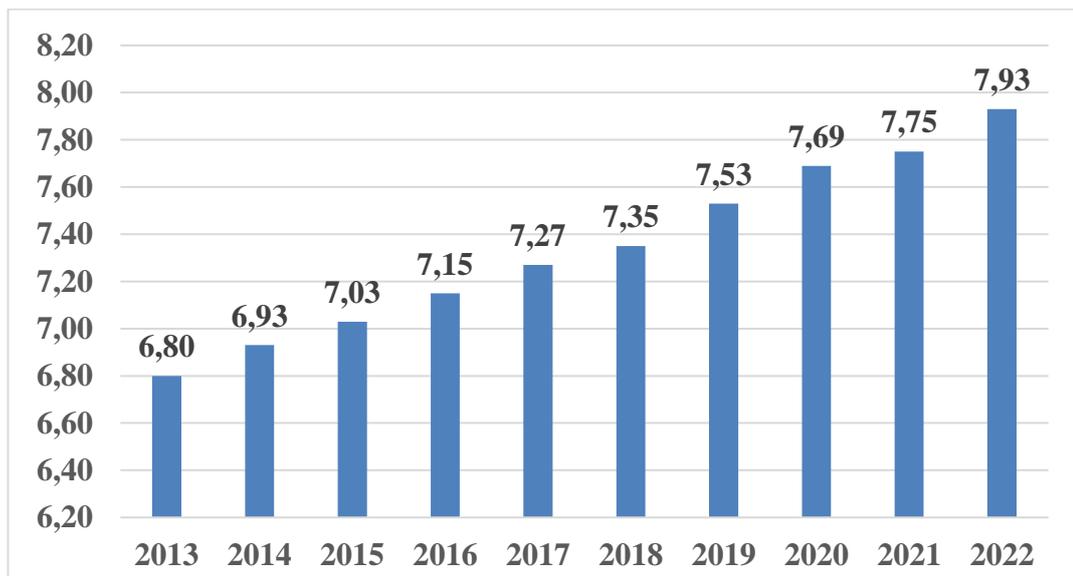
PDRB di provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun mengalami penurunan signifikan pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19, PDRB provinsi Jawa Tengah mampu melampaui tingkat pertumbuhan PDB Nasional. Namun, jika dibandingkan dengan provinsi lain di pulau Jawa, pertumbuhan PDRB provinsi Jawa Tengah masih tergolong rendah. Pada tahun 2022, terjadi peningkatan signifikan pada PDRB provinsi Jawa Tengah yang mencapai 1,050,278 miliar yang menunjukkan tren positif dalam pertumbuhan ekonomi provinsi Jawa Tengah.

Di banyak negara, syarat utama bagi terciptanya penurunan kemiskinan yang tetap adalah PDRB yang tinggi. Proses pembangunan memerlukan pendapatan nasional yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga tingkat kemiskinan akan menurun.

Salah satu faktor lain yang juga mempengaruhi terjadinya kemiskinan adalah tingkat pendidikan. Pendidikan memiliki peran penting dalam mengurangi tingkat kemiskinan baik di negara Indonesia atau negara manapun dalam jangka panjang. Pendidikan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan, pengetahuan seseorang akan bertambah dan akan bermanfaat untuk mempelajari keterampilan yang berguna di dunia kerja.

Pendidikan bisa dilihat dari kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia ini salah satunya adalah kemampuan seseorang untuk mendapatkan pendidikan. Apabila tingkat pendidikan yang rendah, maka akan semakin rendah

juga produktivitas kerja dari masyarakat, apabila produktivitas masyarakat rendah, akan mengakibatkan rendahnya pendapatan, dengan semakin rendahnya pendapatan, maka akan mengurangi kemampuan seseorang untuk dapat memenuhi kebutuhannya, yang berarti akan menambah kemiskinan. Rata-rata lama sekolah adalah salah satu indikator penting untuk mengukur tingkat pendidikan suatu negara maupun daerah. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah, semakin baik pula tingkat pendidikan di negara tersebut. Berikut ini adalah grafik rata-rata lama sekolah di provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2022.

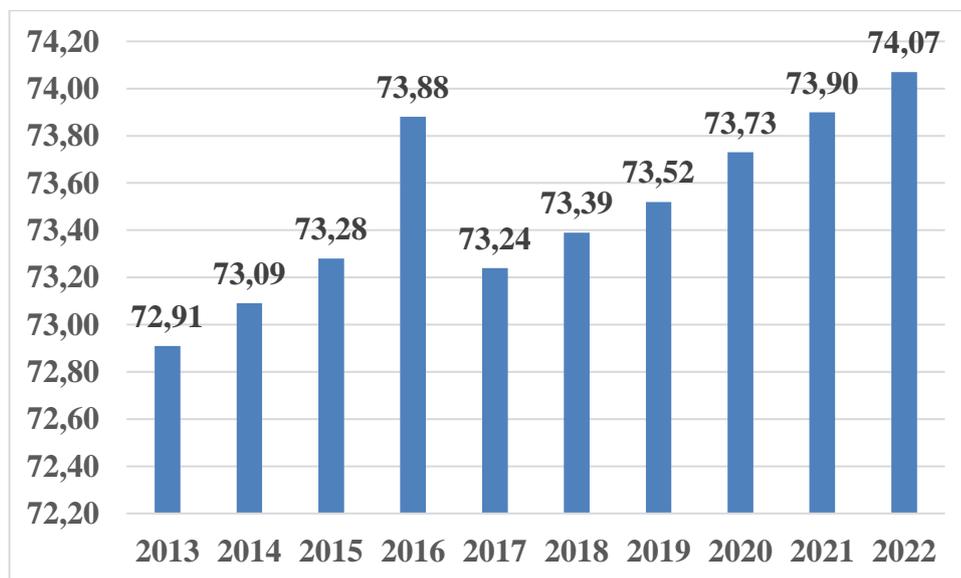


Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 1.3
Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2013-2022 (Tahun)

Data gambar 1.4 menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah di provinsi Jawa Tengah mengalami kenaikan yang signifikan setiap tahunnya mulai dari tahun 2013 hingga 2022. Kenaikan tersebut mencapai puncaknya pada tahun 2022 sebesar 7,93%. Kenaikan pada tahun 2022 tersebut merupakan kenaikan tertinggi selama 10 tahun terakhir.

Selain pendidikan, kesehatan juga memiliki hubungan yang erat dan saling memengaruhi satu sama lain dengan kemiskinan. Menurut *World Health Organization (WHO)*, yang dimaksud dengan sehat yaitu keadaan sejahtera secara fisik, mental, dan sosial yang memungkinkan individu hidup secara produktif baik dalam aspek sosial maupun aspek ekonomi. Dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 dituliskan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan. Dalam hal ini, angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan derajat kesehatan pada khususnya. Angka harapan hidup yang tinggi dapat mengurangi kemiskinan dengan cara meningkatkan kesehatan dan produktivitas masyarakat. Grafik di bawah ini menunjukkan angka harapan hidup di Jawa Tengah pada tahun 2013-2022.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 1.4
Angka Harapan Hidup Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2017-2022 (Tahun)

Pada gambar 1.4 di atas menunjukkan angka harapan hidup tahun 2013-2022 di provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2022, angka harapan hidup mencapai

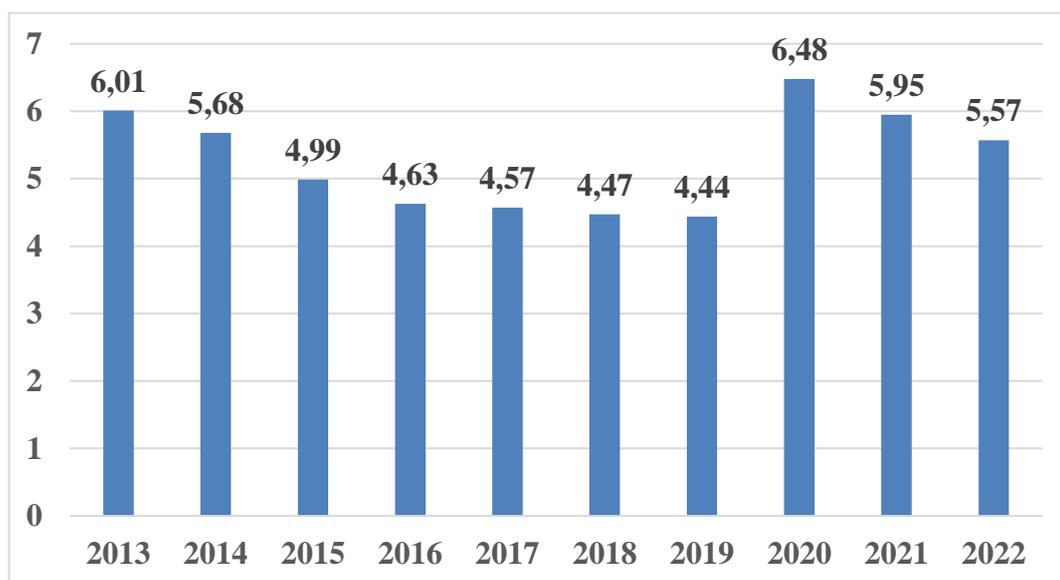
74,07 dan merupakan nilai tertinggi selama 10 tahun terakhir. Angka harapan hidup mengalami peningkatan dari tahun ke tahun pada 2013-2016, dan mengalami penurunan pada tahun 2017 yang mencapai 73,24. Data tersebut secara keseluruhan menunjukkan bahwa rata-rata angka harapan hidup di provinsi Jawa Tengah terus mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan bahwa Jawa Tengah terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Mariyanti dan Mahfudz (2016), dalam konteks kesehatan, konsumsi nutrisi yang buruk dapat memberikan dampak pada tingkat kemiskinan sehingga negara yang penduduknya sehat juga diyakini akan memiliki perekonomian yang “sehat”. Menurut Wyk dan Bradshaw (2017) masyarakat yang memiliki angka harapan hidup yang baik akan meningkatkan kesempatan untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. Sedangkan menurut Ataguba, et al (2013) kesehatan merupakan salah satu faktor penting dalam mengurangi kemiskinan. Sejalan dengan hasil tersebut, Bakhtiari dan Meisami (2009) dalam penelitiannya memperoleh hasil yaitu adanya peningkatan di bidang kesehatan akan menurunkan tingkat kemiskinan.

Tingginya tingkat kemiskinan di suatu daerah juga bisa disebabkan oleh pengangguran. Jika tingkat pengangguran tinggi dan lapangan pekerjaan yang tersedia terbatas, hal itu akan membuat tingkat kemiskinan tinggi. Ketika banyak penduduk di suatu daerah tidak memiliki pekerjaan atau tidak dapat mengakses pekerjaan yang layak, hal itu akan mengakibatkan kemiskinan yang tinggi di daerah tersebut karena penduduknya tidak memiliki sumber pendapatan yang stabil untuk

memenuhi kebutuhan dasar mereka. Oleh karena itu, tingkat pengangguran di suatu daerah haruslah rendah agar tingkat kemiskinan juga rendah.

Tingkat pengangguran di Jawa Tengah tergolong rendah jika dibandingkan dengan provinsi lain di pulau Jawa. Grafik di bawah ini menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Tengah dari tahun 2013-2022.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 1.5
Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2013-2022 (Persen)

Pada gambar 1.5 menunjukkan nilai tingkat pengangguran terbuka di provinsi Jawa Tengah dari tahun 2013-2022. Pada tahun 2013-2019, TPT Jawa Tengah terus mengalami penurunan hingga mencapai nilai terendah sebesar 4,44%. Kemudian terjadi kenaikan pada tahun 2020 yang mencapai 6,48% yang merupakan kenaikan tertinggi selama 10 tahun terakhir. Selanjutnya pada tahun 2021-2022 TPT Jawa Tengah mengalami penurunan walaupun masih lebih tinggi dari tahun-tahun sebelum terjadi pandemi Covid-19. Fluktuasi ini mencerminkan dinamika

kebijakan dan upaya pemerintah di provinsi Jawa Tengah dalam menangani masalah pengangguran selama periode tersebut.

Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi masalah kemiskinan, salah satunya adalah pengendalian laju inflasi. Inflasi merupakan kenaikan harga barang secara keseluruhan dan terus menerus. Jika yang naik hanya satu barang saja tidak bisa disebut inflasi kecuali kenaikan harga barang tersebut mempengaruhi harga barang lain. Dengan meningkatnya tingkat inflasi menyebabkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya menurun, akibatnya tingkat kemiskinan semakin tinggi.

Tingginya tingkat kemiskinan di suatu daerah dapat menyebabkan daya beli masyarakat menjadi rendah. Hal ini terjadi karena pada umumnya pendapatan masyarakat yang rendah. Keadaan ini akan menjadi lebih parah lagi apabila diikuti pula dengan tingginya tingkat pengangguran. Saat ini pengangguran bukan hanya menjadi masalah ekonomi, melainkan juga menjadi masalah sosial dan politik. Dampak sosial yang ditimbulkan dari pengangguran yang tinggi dapat meningkatkan tingkat kriminalitas, baik berupa perampokan, pencurian maupun perdagangan ilegal. Hal ini dapat terjadi karena tuntutan kebutuhan hidup masyarakat yang harus dipenuhi, minimal kebutuhan pokok (Rezki Mardiatillah, 2021).

Dilihat dari unsur yang mempengaruhinya, kemiskinan bisa dibedakan atas kemiskinan struktural dan kultural. Kemiskinan kultural yaitu suatu keadaan yang mengacu kepada sikap seseorang atau masyarakat karna *life style*, *habbits* serta kebudayannya. Kemiskinan kultural dapat dilihat dari tindakan seseorang atau

sekelompok masyarakat yang menganggap keadaannya tidaklah miskin, padahal apabila di ukur berdasar garis kemiskinan mereka adalah kelompok dengan kategori miskin. Sementara itu kemiskinan struktural ialah suatu kondisi kemiskinan karena struktur dari masyarakat itu timpang, dapat terjadi karena berbedanya ke pemilikan, sumberdaya, penghasilan, dan kesempatan kerja yang tidak merata atau karena penyebaran pembangunan dan outputnya tidak rata. Kemiskinan struktural dapat dilihat dari susunan masyarakat yang tidak seimbang terutama jika ditinjau dari ukuran ekonomi (Suryawati, 2005).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti mengkaji lebih lanjut terkait “**Analisis Determinan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2022**”.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Adapun rumusan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh PDRB, rata-rata lama sekolah angka harapan hidup, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2022 secara parsial?
2. Bagaimana pengaruh PDRB, rata-rata lama sekolah angka harapan hidup, dan tingkat pengangguran terbuka terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2022 secara bersama-sama?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh PDRB, rata-rata lama sekolah angka harapan hidup, dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2022 secara parsial.
2. Uengetahui pengaruh PDRB, rata-rata lama sekolah angka harapan hidup berpengaruh, dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2022 secara bersama-sama.

1.4 Manfaat Hasil Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Kegunaan penelitian ini dapat memberikan justifikasi empiris terhadap signifikansi terkait dengan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, pengangguran, dan kesehatan terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2022 yang berguna untuk provinsi Jawa Tengah.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis di harapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat diantaranya:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi nilai tambah berupa pengetahuan dan wawasan terkait topik tingkat kemiskinan serta variabel-variabel yang mempengaruhi.

2. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait analisis determinan tingkat kemiskinan di provinsi Jawa Tengah yang nantinya dapat

